

STUDI KASUS HUKUM

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN TERHADAP ABH ATAS PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

**(STUDI PUTUSAN NOMOR : 1/PID.SUS-ANAK/2023/PN.KBR DAN NOMOR
1/PID.SUS-ANAK/2024/PN.KBR)**

***Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas***

Oleh :

**SYHAR EZER YUDISTHIRA MANIK
2210112140**

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing:

**Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.
Felia Hermayenti, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2026

No. Reg: 02/PK-IV/V/2026

LEMBAR PENGESAHAN
VALIDITY SHEET
No.Reg: 02/PK IV/V/2026

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PEMIDANAAN TERHADAP ABH ATAS PENGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN (Studi Putusan Nomor : 1/PID.SUS-ANAK/2023/PN.KBR Dan
Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2024/PN.KBR)

*THE BASIS OF JUDICIAL CONSIDERATIONS IN IMPOSING CRIMINAL
SANCTIONS ON CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW FOR
REPEATED THEFT OFFENSES (A Study Of Decision Number 1/PID.SUS-
ANAK/2023/PN.KBR And Decision Number 1/PID.SUS-ANAK/2024/PN.KBR)*

Disusun Oleh
Author

SYHAR EZER YUDISTHIRA MANIK
NIM : 2210112140

Program Kekhususan (PK) : Hukum Pidana (PK IV)
Concentration Program (CP): Criminal Law (CP IV)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada tanggal 16
September 2026 dan dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:

*This Minor Thesis Was Defended In the Comprehensive Examination Session on
September 16st 2026 and Approved by a Team Of Examiners Consisting of:*

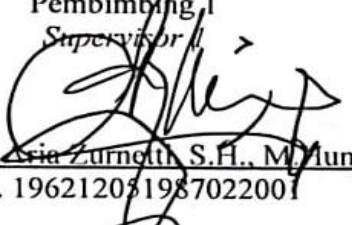
Dekan
Dean


Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.Hum.
NIP. 196807231993021001

Wakil Dekan 1
Vice Dean 1


Dr. Nani Mulyati, S.H., MCI.
NIP. 198208092005012002

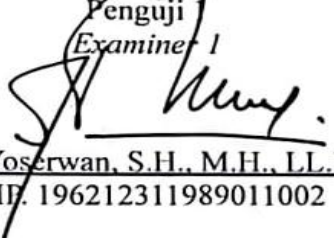
Pembimbing 1
Supervisor 1


Prof. Dr. Asia Zurnoith, S.H., M.Hum.
NIP. 196212051987022001

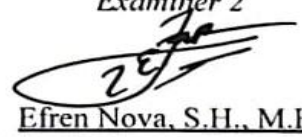
Pembimbing 2
Supervisor 2


Felia Hermayenti S.H., M.H.
NIP. 199812082024062001

Penguji 1
Examiner 1


Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 196212311989011002

Penguji 2
Examiner 2


Efren Nova, S.H., M.H.
NIP. 196110111987022001

	No. Alumni Universitas	Syhar Ezer Yudisthira Manik	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Painan /29 Maret 2004 b. Nama Orangtua : M. Manik, S.H.,Desmina Simamora, S.H. c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Pidana e. No. BP : 2210112016	f. Tanggal Lulus : 16 September 2026 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun 1 Bulan i. IPK : 3,92 j. Alamat : Komplek PU Jln. Saiyo, Sago, Kab. Pesisir Selatan	

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN TERHADAP ABH ATAS PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Nomor : 1/PID.SUS-ANAK/2023/PN.KBR Dan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PN.KBR)

(Syhar Ezer Yudisthira Manik, 2210112140, Fak. Hukum Universitas Andalas, 135 Hlm, 2026)

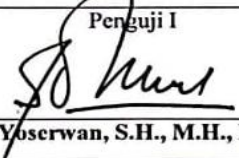
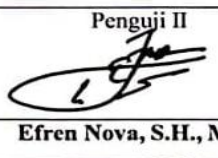
ABSTRAK

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan subjek yang memperoleh perlindungan khusus dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan tersebut menghadapi tantangan ketika Anak kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya memperoleh tindakan pembinaan karena pengulangan tindak pidana memiliki konsekuensi terhadap Diversi dan penjatuhan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh Anak dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana ditinjau dari tujuan pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr telah sesuai dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) berdasarkan Pasal 183 KUHP. Pembuktian didasarkan pada alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, surat, dan keterangan Anak yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti, sehingga membentuk keyakinan hakim mengenai terpenuhinya unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Berdasarkan KUHP lama, barang bukti tidak diposisikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, tetapi berfungsi memperkuat fakta yang diperoleh dari alat bukti yang sah. Perkembangan pengaturan dalam KUHP baru kemudian secara eksplisit menempatkan barang bukti sebagai salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Pengulangan tindak pidana tidak memengaruhi standar pembuktian. Dalam perkara *a quo*, pengulangan tidak dikonstruksikan sebagai pemberatan berdasarkan Pasal 486 KUHP, tetapi putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dicantumkan sebagai keadaan yang memberatkan dalam Surat Tuntutan serta memiliki konsekuensi terhadap penerapan Diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Penjatuhan pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis, termasuk riwayat penanganan Anak, kondisi pribadi dan lingkungan Anak, serta rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Berdasarkan tujuan pemidanaan dalam SPPA, pidana pembinaan dalam lembaga tidak semata-mata merupakan bentuk pemberatan atas pengulangan tindak pidana, melainkan upaya memberikan pembinaan yang lebih terstruktur setelah tindakan sebelumnya belum mampu mencegah Anak kembali melakukan tindak pidana. Dengan demikian, putusan hakim telah berupaya menyeimbangkan penegakan hukum, perlindungan dan pembinaan Anak, serta pencegahan pengulangan tindak pidana dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*).

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Anak Berhadapan dengan Hukum, Pengulangan, Pembuktian, UU SPPA

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus 16 September 2026.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Nama Terang	Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M.	Efren Nova, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	Syhar Ezer Yudisthira Manik	Alumni University Number
	a. Place/Date of Birth : Painan/ 29 th Sept 2004 b. Parents' Name : M. Manik, S.H.,Desmina Simamora, S.II. c. Faculty : Law d. Concentration : Criminal Law e. Student ID : 2210112140	f. Graduation Date : 16 th Sept 2026 g. Pass Predicate : Cumlaude h. Length of Study : 4 Years 1 Month i. GPA : 3,92 j. Address : Komplek PU Jln. Saiyo, Sago, Kab. Pesisir Selatan	

THE BASIS OF JUDICIAL CONSIDERATIONS IN IMPOSING CRIMINAL SANCTIONS ON CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW FOR REPEATED THEFT OFFENSES (A Case Study Of Decision Number 1/PID.SUS-ANAK/2023/PN KBR And Number 2/PID.SUS-ANAK/2024/PN KBR)
(Syhar Ezer Yudisthira Manik, 2210112140, Faculty of Law, Andalas University, 135 Pages, 2026)

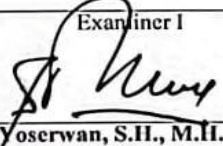
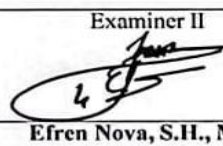
ABSTRACT

Children in conflict with the law. Children in conflict with the law are entitled to special protection under the Juvenile Criminal Justice System. This protection faces challenges when a child reoffends after previously receiving a rehabilitative measure, as reoffending has consequences for Diversion and sentencing. This study analyzes the system of proof in the aggravated theft committed by a child in Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr and the judges' considerations in imposing a criminal sanction on a child who reoffends from the perspective of the objectives of sentencing under the Juvenile Criminal Justice System. This normative juridical research is descriptive-analytical and employs case, statutory, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed qualitatively. The results show that the system of proof in Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr complies with the negative statutory system of proof (negatief wettelijk bewijstheorie) under Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code. The fulfillment of the elements of aggravated theft under Article 363 paragraph (1) point 3 of the Criminal Code was established through mutually consistent witness testimony, documentary evidence, and the child's statement, supported by physical evidence. Under the previous Criminal Procedure Code, physical evidence was not an independent form of evidence but reinforced facts derived from legally admissible evidence. The new Criminal Procedure Code subsequently recognizes physical evidence as a form of evidence under Article 235 paragraph (1) letter e of Law Number 20 of 2025. Reoffending does not affect the applicable standard of proof. In the a quo case, it was not formulated as a ground for sentence enhancement under Article 486 of the Criminal Code, although the prior final judgment was included as an aggravating circumstance in the Public Prosecutor's sentencing demand and had consequences for Diversion under Article 7 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The sentence of institutional guidance for 1 (one) year and 6 (six) months was based on juridical and non-juridical considerations, including the child's prior legal history, personal and environmental circumstances, and the Social Inquiry Report. The institutional guidance was not merely intended as harsher punishment for reoffending but as a more structured rehabilitative measure after the previous measure had not prevented the child from committing another offense. The decision therefore sought to balance law enforcement, child protection and rehabilitation, and the prevention of reoffending in accordance with the principle of the best interests of the child.

Keywords: Judicial Considerations, Children in Conflict with the Law, Repeated Offenses, Evidentiary Process, Juvenile Criminal Justice System.

This minor thesis has defended in front of the examiner team at Sept 16th, 2026.

Examiner,

Signature		
Name	Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M.	Efren Nova, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of State Criminal Law: Riki Afrizal, S.H., M.H.


Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty:	Name:	Signature:
No. Alumni University:	Name:	Signature: